



LAPORAN KINERJA 2025

Pangkalan PSDKP Benoa



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan



KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) pada Tahun 2025 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa (Pangkalan PSDKP Benoa) pada Tahun 2025.

LKj Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Pangkalan PSDKP Benoa dalam kurun waktu Tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolok ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf Pangkalan PSDKP Benoa dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Denpasar, 19 Januari 2026
Kepala Pangkalan PSDKP Benoa



Edi Purnomo, S.St.Pi, M.Si
NIP. 19840622 200901 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Perjanjian Kinerja 2025 yang telah ditetapkan. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggung jawaban Pangkalan PSDKP Benoa kepada Ditjen. PSDKP, atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Pangkalan PSDKP Benoa telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Pangkalan PSDKP Benoa menetapkan 8 (delapan) Sasaran Kegiatan, yaitu: ⁽¹⁾ Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif; ⁽²⁾ Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif; ⁽³⁾ Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan; ⁽⁵⁾ Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan; ⁽⁷⁾ Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan; ⁽⁸⁾ Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi dinilai berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja yang telah dilakukan. Nilai Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Benoa pada tahun 2025 sebesar 105,71%. Seluruh indikator kinerja yang berjumlah 21 indikator telah tercapai sesuai target.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Benoa TA. 2025 sebesar Rp. 35.422.608.000,00. Realisasi anggaran hingga 31 Desember 2025 sebesar Rp. 32.605.487.721,00 dengan persentase 92,05%. Dengan menimbang realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Pangkalan PSDKP Benoa pada tahun 2025 sebesar 50.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Aspek Startegis dan Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ..	2
D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Benoa	3
E. Sistematika Penyajian Laporan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2025-2029.....	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	7
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2025	11
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	12
C. Efisiensi.....	44
D. Akuntabilitas Keuangan.....	46
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Rekomendasi	47
LAMPIRAN	48

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa (Pangkalan PSDKP Benoa) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang diberikan amanah untuk berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan SDKP Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengawasan SDKP 2025-2029.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Pangkalan PSDKP Benoa telah melakukan pengukuran kinerja setiap triwulan dan melaporkannya secara rutin kepada Direktur Jenderal PSDKP.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Benoa adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2025, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik berikutnya.

C. Aspek Strategis dan Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Aspek strategis yang dapat menunjang pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP Benoa antara lain :

1. Perkembangan teknologi saat ini sudah mencapai Teknologi 4.0, dimana dalam penggunaannya sudah mengintegrasikan teknologi digital canggih seperti kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), Big Data, *Cloud Computing*, dan otomatisasi. Penerapan teknologi tersebut sangat bermanfaat dalam manajemen pengelolaan serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang efektif dan efisiensi.
2. Sarana dan prasarana pengawasan yang memadai sehingga dapat menunjang kegiatan pengawasan dalam bidang kelautan dan perikanan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa.

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP Pangkalan PSDKP Benoa, antara lain:

1. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

- a. Penerapan Teknologi Pengawasan Canggih (Advanced Technology)
- b. Penggunaan teknologi canggih dalam kegiatan pengawasan dapat mendorong inovasi dan efisiensi dalam pengawasan. Namun didalam penggunaannya membutuhkan SDM yang mumpuni dalam pengoperasian maupun analisa hasil pengawasan.
- c. Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing
- d. Pelanggaran IUU Fishing oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Indonesia yang semakin kompleks, terjadi modus operandi baru termasuk mark down (penurunan ukuran kapal dalam dokumen), penggunaan alat tangkap tidak sesuai standar/modifikasi, transshipment (alih muatan) di laut maupun kegiatan penyelundupan barang illegal melalui kapal perikanan.
- e. Penerapan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) mendapat sejumlah penolakan dari beberapa aliansi nelayan (NTB, Probolinggo, Lamongan, Tuban). aliansi nelayan tersebut berpendapat bahwa jumlah prosentasi pungutan PNBK memberatkan nelayan dikarenakan biaya operasional penangkapan yang semakin meningkat. Pemasangan dan penggunaan VMS bagi kapal daerah yang telah bermigrasi (≤ 30 GT) dirasa memberatkan, khususnya bagi kapal pancing/rawai tuna (NTB).
- f. Konflik nelayan yang terjadi dikarenakan penggunaan alat penangkap ikan alat tangkap maupun jalur penangkap ikan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Banyak usaha budidaya yang belum memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) (resiko menengah tinggi).

- h. Tuntutan masyarakat terkait keamanan pangan produk perikanan Indonesia.
- i. Semenjak terjadinya kasus kontaminasi produk udang vaname
- j. Perlunya adanya pembelajaran maupun bimbingan teknis terkait penerapan KUHP dan KUHP baru, yang erat kaitannya dalam hal penegakan hukum pidana dibidang kelautan dan perikanan.

2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

- a. Banyak pelaku usaha perikanan dan kelautan yang belum memiliki maupun mengetahui perizinan berusaha pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE).
- b. Implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dimana pada pemanfaatan air laut > 30 M³/Bulan harus memiliki izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini, sebagian besar air laut yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha berjumlah > 30 M³/Bulan. Sehingga dalam perizinannya menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (pusat).
- c. Banyak pelaku usaha yang belum memahami aturan dibidang kelautan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, beberapa peraturan dibidang kelautan dan PWP3K mengalami perubahan, sehingga diperlukan sosialisasi yang masif terkait aturan tersebut. Sehingga dalam penerapan sanksi, ketidaktahuan aturan tidak lagi menjadi alasan para pelaku usaha dalam melakukan usaha dibidang kelautan dan PWP3K.
- d. Pencemaran laut. Masih banyak ditemukan sampah dilaut, khususnya sampah plastik yang membahayakan ekosistem laut. Sebagian besar sampah plastik di laut berasal dari aktivitas daratan yang terbawa melalui sungai maupun aktivitas kelautan seperti sisa jaring ikan yang hilang/terbuang, limbah kapal maupun aktivitas pariwisata pantai.
- e. Perlu peningkatan kapasitas sdm pengawas kelautan/polsus PWP3K dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan PWP3K. Adapun peningkatan yang dibutuhkan yaitu dalam pengoperasian drone, software GIS, dll.

D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Benoa

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan PSDKP Benoa mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pangkalan PSDKP Benoa menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pangkalan PSDKP Benoa dipimpin oleh Kepala Pangkalan yang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator. Kepala Pangkalan membawahi Kepala Subbagian Umum yang merangkap sebagai Ketua Tim Dukungan Manajemen, Ketua Tim Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Ketua Tim Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ketua Tim Penanganan Pelanggaran, Ketua Tim Prasarana, Sarana dan Operasional Kapal Pengawas.

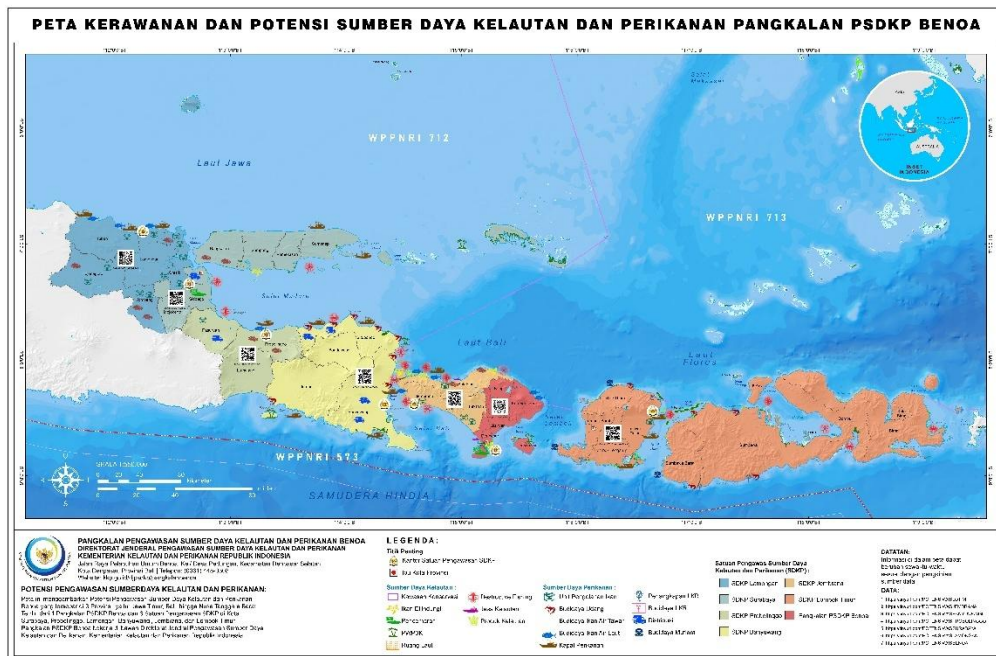
Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Benoa



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan PSDKP Bena membawahi 6 (enam) Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satwas SDKP) yaitu sebagai berikut:

1. Satwas SDKP Lombok Timur;
2. Satwas SDKP Jembrana;
3. Satwas SDKP Banyuwangi;
4. Satwas SDKP Probolinggo;
5. Satwas SDKP Lamongan;
6. Satwas SDKP Surabaya.

Gambar 2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bena



E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Bena tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang gambaran umum Pangkalan PSDKP Bena, aspek strategis dan isu aktual pengawasan SDKP

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian Pangkalan PSDKP Benoa pada Tahun 2025.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja dan langkah mendatang yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Bab V Lampiran

Melampirkan perjanjian kinerja, penghargaan yang diraih atau dokumen lainnya

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor : 86 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi Ditjen PSDKP adalah :

“Indonesia bebas pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan demi Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Dengan misi :

“Meningkatkan pengawasan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang partisipatif, efektif, tangguh dan sinergis”

“Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP”

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2025-2029. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2025-2029 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu :

“Meningkatnya Ketangguhan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Serta

**Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing.”
dan**

**“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan
Berkualitas lingkup Ditjen PSDKP”**

Berdasarkan Tujuan Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 tersebut maka disusunlah sasaran program Ditjen PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran strategis KKP tahun 2025-2029 sebagaimana berikut :

- a. SS-1 terlindunginya laut dan sumber dayanya serta menjaga kelestarian wilayah laut;
- b. SS-2 Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan serta pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. SS-3 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar domestik dan internasional
- d. SS-4 Meningkatnya kualitas SDM kelautan dan perikanan
- e. SS-5 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas

Dari sasaran KKP di atas, Ditjen PSDKP mempunyai sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- b. Indeks reformasi birokrasi KKP

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; ⁽⁴⁾ Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Sebagai upaya perbaikan perencanaan dari tahun sebelumnya, Pangkalan PSDKP Benoa pada awal tahun 2025 telah menetapkan 9 sasaran kegiatan dan 21 Indikator Kinerja. Namun pada bulan Desember telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja dengan beberapa perubahan yaitu sasaran kegiatan menjadi 8 (delapan) dan indikator kinerja tetap 21

akan tetapi ada beberapa indikator yang berubah target dan satuannya. Adapun indikator yang berubah antara lain adalah :

1. Indikator kinerja nomor 2, semula tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan dengan target 75 menjadi nilai kualitas operasi intelijen kelautan dengan target 100;
2. Indikator kinerja nomor 3, semula tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan dengan target 75 menjadi nilai kualitas operasi intelijen perikanan dengan target 100;
3. Indikator kinerja nomor 4, semula Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks) dengan target 100 menjadi Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan dengan target 82;
4. Indikator kinerja nomor 5, semula Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks) dengan target 100 menjadi Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan dengan target 82;
5. Sasaran kegiatan Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan dihapus sehingga Indikator kinerja nomor 8 yaitu Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP dengan target 100% masuk pada sasaran kegiatan Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif;
6. Target Indikator kinerja nomor 11, Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan semula 94 menjadi 81;
7. Target Indikator kinerja nomor 12, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Benoa semula 81,5 menjadi 71,5;
8. Target Indikator kinerja nomor 14, Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Benoa semula 87 menjadi 81;
9. Target Indikator kinerja nomor 18, Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa semula 88,5 menjadi 80;
10. Target Indikator kinerja nomor 19, Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Benoa semula 80 menjadi 75;
11. Indikator kinerja nomor 20, semula Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Benoa (Unit) menjadi Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Benoa dengan target 77.

Perjanjian kinerja Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	82
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2 Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100
		3 Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4 Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	82
4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5 Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82
5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6 Indeks operasi kapal pengawas	92
		7 Indeks operasi speedboat pengawas	92
		8 Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	100
6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9 Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81
		10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81
7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	81
8	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Benoa	71,5
		13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Benoa	92
		14 Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Benoa	81
		15 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Benoa	86
		16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Benoa	100%
		17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%
		18 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa	80
		19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Benoa	75
		20 Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Benoa	77
		21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama implementasi pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Pangkalan PSDKP Bena dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan) dan tahunan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukkan kedalam Sistem Aplikasi Kinerja berbasis informasi teknologi dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2025

Dalam pengelolaan kinerja Pangkalan PSDKP Benoa telah menetapkan 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja. Nilai Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Benoa sebesar 105,71 %, sebagaimana yang disajikan pada gambar berikut :

Gambar 3.1. Nilai Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2025



Nilai Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2025 tersebut diperoleh dari capaian indikator kinerja sebagaimana yang disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Capaian Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	82	82	100,00
2	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100	100	100,00
3	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100	100	100,00
4	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	82	100	120,00
5	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82	100	120,00
6	Indeks operasi kapal pengawas	92	93,95	102,12
7	Indeks operasi speedboat pengawas	92	94,97	103,23
8	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	100	100	100,00

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
9	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81	81	100,00
10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81	81	100,00
11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	81	81	100,00
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Benoa	71,5	89,77	120,00
13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Benoa	92	96,04	104,39
14	Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Benoa	81	85,64	105,73
15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Benoa	86	87,8	102,09
16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Benoa	100%	100	100,00
17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%	100	105,26
18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa	80	91,44	114,30
19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Benoa	75	88,5	118,00
20	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Benoa	77	84,9	110,26
21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	82,21	117,44

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Benoa telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

Kegiatan 1. Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif", Pangkalan PSDKP Benoa telah mengidentifikasi 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas.

Indikator Kinerja 1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas

Capaian indikator "Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas" pada tahun 2025 sebesar 82 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 82. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas tahun 2025

Indikator Kinerja	2025			2026	2027	2028	2029
	T	R	%	T	T	T	T
Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	82	82	100	83	84	85	86

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2025 realisasi indeks kualitas pembinaan pokmaswas adalah 82 dari yang ditargetkan sebesar 82. Pada tahun 2025 terdapat kebijakan nasional berupa pemblokiran atau penghematan anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan, maka capaian indikator indeks kualitas pembinaan Pokmaswas sebesar nilai target kinerja tahun berjalan, yaitu sebesar 82 (sesuai dengan Manual IKU).

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024, capaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 lebih tinggi yaitu 100% karena pada tahun 2024 terlaksana kegiatan pembinaan Pokmaswas sesuai target sedangkan pada tahun 2025 terdapat penghematan anggaran sehingga kegiatan pembinaan pokmaswas tidak dapat terlaksana.

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian dengan Satker UPT/ Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (%)	82	82	100	82	100	100	100

Capaian indikator kinerja indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Pangkalan PSDKP Benoa sama dengan capaian Pangkalan PSDKP Batam tetapi lebih rendah dari Pangkalan PSDKP Lampulo, Jakarta, Bitung dan Tual.

Sasaran Kegiatan 2. Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif" diidentifikasi ke dalam 2 (dua) indikator kinerja yaitu ¹⁾ Nilai kualitas operasi intelijen kelautan dan ²⁾ Nilai kualitas operasi intelijen perikanan.

Indikator Kinerja 2. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan

Pencapaian indikator kinerja "Nilai kualitas operasi intelijen kelautan" Pangkalan PSDKP Benoa pada tahun 2025 dengan capaian 100%, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan

Indikator Kinerja	2025			2026	2027	2028	2029
	T	R	%	T	T	T	T
Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2025 realisasi nilai kualitas operasi intelijen kelautan Pangkalan PSDKP Benoa adalah 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru.

Intelijen kelautan adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendektasian dan peringatan dini dalam rang pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya kelautan. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan dalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, ketepatan, dan akurasi pelaksanaan kegiatan intelijen. Indikator kinerja nilai kualitas operasi intelijen kelautan dapat dicapai melalui kegiatan yang telah dilaksanakan Pangkalan PSDKP Benoa sebagai berikut :

Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	NAMA PERUSAHAAN INSTANSI PERORANGAN	KEGIATAN/KEJADIAN	REKOMENDASI/TINDAKAN	Kriteria	Nilai
1	24 Februari 2025	Bangsring Underwater (BUNDER), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjung Wangi, DInas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi	Laporan Masyarakat adanya pencemaran di Bangsring Banyuwangi	Pencemaran laut baru diketahui, setelah oli/minyak berada di tepi Pantai Bangsring, sehingga tidak diketahui asal muasal oli/minyak berasal. Pengelola telah diberi sosialisasi dari pihak KSOP dan DLH agar cepat tanggap untuk melaporkan kejadian seperti ini, sehingga dapat ditangani. Telah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait (KSOP dan DLH Kabupaten Banyuwangi)	Kredibel dan diterima	A1 (100)
2	26 Februari 2025	PT. Delta Guna Sukses	Laporan Open Source Intelejen laporan masyarakat limbah tambak di Jember	Di sekitar lokasi Outlet IPAL PT. DGS sungai Desa Mayangan, Tidak ditemukan adanya pencemaran yang mengakibatkan seperti yang telah dilaporkan Masyarakat Desa Kepanjen. Perlunya adanya panataan lokasi usaha pertanian dan pembudidaya (petambak tradisional) sehingga tidak berselisih pendapat terhadap pasang air laut	Kredibel dan diterima	A1 (100)

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	NAMA PERUSAHAAN INSTANSI PERORANGAN	KEGIATAN/KEJADIAN	REKOMENDASI/TINDAKAN	Kriteria	Nilai
				yang masuk melalui saluran Sungai (klep).		
3	25 Maret 2025	Kapal Penumpang Mutiara Sentosa III	Pengumpulan bahan keterangan terkait kandasnya kapal di Pantai Cemara, Kabupaten Lombok Barat	Berkoordinasi dengan KSOP Lembar terkait terdamparnya Kapal Penumpang Mutiara Sentosa III di Pantar Cemara, Kab Lombok Barat, serta mengunjungi lokasi terdamparnya kapal di Pantai Cemara diperoleh hasil informasi bahwa kapal terkena hembusan angin sebesar 24/25 knot, saat terkena angin kapal sudah berada di lokasi lego jangkar, sekitar perairan berpasir tidak terdapat terumbu karang.	Kredibel dan diterima	A1 (100)
4	14 JULI 2025	PLTU Lombok FTP-2	Koordinasi dan tindak lanjut open source intelligence(OSINT) analisis laporan masyarakat melalui media sosial terkait tumpahan batubara	Tidak ditemukan adanya tumpahan batubara seperti yang dilaporkan	Kredibel dan diterima	A1 (100)
5	4 Juli 2025	BPN Provinsi NTB	Laporan media elektronik	Berkoordinasi dengan ATR/BPN kanwil NTB bahwa tidak ada pulau di NTB yang dimiliki oleh asing	Kredibel dan diterima	A1 (100)
TOTAL CAPAIAN						100

Pencapaian indikator kinerja nilai kualitas operasi intelijen kelautan Pencapaian ini diperoleh dari hasil kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan yang dilakukan oleh pengawas kelautan dan polys PWP3K di Pangkalan PSDKP Benoa maupun di Satwas SDKP di bawah Pangkalan PSDKP Benoa. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung dengan adanya koordinasi Pangkalan PSDKP Benoa dengan instansi terkait dan pokmaswas serta sosialisasi kepada pelaku usaha kelautan melalui media sosial.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja nilai kualitas operasi intelijen kelautan Pangkalan PSDKP Benoa sebesar Rp. 20.505.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 20.458.200,- atau 99,77 %.

Tabel 3.6. Perbandingan Capaian dengan Satker UPT/ Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100	100	100	100	100	100	75

Capaian indikator kinerja nilai kualitas operasi intelijen kelautan Pangkalan PSDKP Benoa apabila dibandingkan dengan satker UPT sejenis adalah sama yaitu 100 kecuali dengan Pangkalan PSDKP Tual lebih tinggi.

Indikator Kinerja 3. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan

Pencapaian indikator kinerja "Nilai kualitas operasi intelijen perikanan" Pangkalan PSDKP Benoa pada tahun 2025 dengan capaian 100%, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan

Indikator Kinerja	2025			2026	2027	2028	2029
	T	R	%	T	T	T	T
Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2025 realisasi nilai kualitas operasi intelijen perikanan Pangkalan PSDKP Benoa adalah 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian indikator kinerja Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan pada tahun 2025 sesuai dengan Manual IKU yang telah ditetapkan. Sehubungan terdapat kebijakan nasional berupa pemblokiran atau penghematan anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan, maka capaian indikator nilai kualitas operasi intelijen perikanan ditetapkan sebesar nilai target kinerja tahun berjalan, yaitu sebesar 100. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru.

Capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru.

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian dengan Satker UPT/ Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100	100	100	75	100	100	75

Capaian indikator kinerja nilai kualitas operasi intelijen perikanan Pangkalan PSDKP Benoa lebih tinggi dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP Tual dan Pangkalan PSDKP Batam, dan sama capaian Pangkalan PSDKP Lampulo, Jakarta dan Bitung.

Sasaran Kegiatan 3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan.

Indikator Kinerja 4. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan

Pencapaian indikator kinerja "Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan" dengan capaian 100%, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Indikator Kinerja	2025			2026	2027	2028	2029
	T	R	%	T	T	T	T
Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	82	100	120	83	84	85	86

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2025 realisasi indikator kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan Pangkalan PSDKP Benoa adalah 100 dari yang ditargetkan sebesar 82. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru.

Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan adalah ukuran yang menggambarkan tingkat efektivitas, ketepatan, dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaku usaha kelautan. Pengawasan pelaku usaha kelautan merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator yang terdiri dari :

- Nilai penyelesaian pengawasan OSS;
- Nilai penyelesaian pengawasan selain OSS;
- Nilai penyelesaian pengawasan insidental.

Tabel 3.10. Penyelesaian Pengawasan Sumber Daya Kelautan

No	Komponen	Jumlah Pelaku Usaha	Nilai Tahapan			Total Nilai
			Persiapan	Pelaksanaan	Pelaporan	
1	Nilai penyelesaian pengawasan OSS	-	-	-	-	-
2	Nilai penyelesaian pengawasan selain OSS	35	15	65	20	100
3	Nilai penyelesaian pengawasan insidental	55	15	65	20	100

Pencapaian kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan Pangkalan PSDKP Benoa telah melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2025. Pencapaian indikator kinerja ini

diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas kelautan dan polsus PWP3K lingkup Pangkalan PSDKP Benoa terhadap 90 pelaku usaha. Pengawasan yang dilakukan antara lain pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan produk dan jasa kelautan dan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh kompetensi yang dimiliki oleh pengawas kelautan dan polsus PWP3K di lingkup Pangkapan PSDKP Benoa serta dengan dukungan fasilitas sarana yang dimiliki Pangkalan PSDKP Benoa. Selain itu juga didukung dengan adanya koordinasi Pangkalan PSDKP Benoa dengan instansi terkait dan pokmaswas serta sosialisasi kepada pelaku usaha kelautan melalui media sosial.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan Pangkalan PSDKP Benoa sebesar Rp. 337.163.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 337.078.299,- atau 99,97%.

Tabel 3.11. Perbandingan Capaian dengan Satker UPT/ Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	100	100	100	100	100	100	100

Capaian indikator kinerja Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan Pangkalan PSDKP Benoa apabila dibandingkan dengan satker UPT sejenis adalah sama yaitu 100%.

Sasaran Kegiatan 4. Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pencapaian sasaran kegiatan "Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan" telah diidentifikasi dalam indikator kinerja "Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan".

Indikator Kinerja 5. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pencapaian indikator kinerja "Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan" tahun 2025 adalah 100% dari target sebesar 100%. Capaian kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tahun 2025

Indikator Kinerja	2025			2026	2027	2028	2029
	T	R	%	T	T	T	T
Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82	100	120	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2025 realisasi nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan Pangkalan PSDKP Benoa adalah 100 dari yang ditargetkan sebesar 82. Capaian ini

tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru.

Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha mencakup pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur dan tindak lanjut perbaikan pelaku usaha atas rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan, dalam rangka kepatuhan pelaku usaha perikanan. Pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur adalah rata – rata kualitas pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha oleh Pengawas Perikanan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa.

Pencapaian nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2025

No	Pelaku Usaha	Persiapan (10)	Pelaksanaan (70)	Pelaporan (20)	TOTAL
1	Pengawasan Keberangkatan dan Kedatangan Kapal Perikanan HPK-SLO HPK D : 1708 HPK B : 1705 SLO 1391	10	70	20	100
2	Pengawasan Jenis ikan dilindungi 27 pelaku usaha	10	70	20	100
3	Pengawasan unit Pengolahan ikan STKL: 3 pelaku usaha, Non STKL: 1 pelaku usaha	10	70	20	100
4	Wasrisk Budidaya STKL: 6 pelaku usaha, Non STKL: 6 pelaku usaha	10	70	20	100
5	Pengawasan insidental dan KPB 30 pelaku usaha	10	70	20	100
Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan					100

Pencapaian kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan Pangkalan PSDKP Benoa telah melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2025. Pencapaian ini diperoleh dari hasil kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan di lingkup wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa. dimana pengawas perikanan yang tersebar di wilayah kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa berjumlah 57 orang. Keberhasilan pencapaian ini selain didukung dengan anggaran operasional dan sarana prasarana yang ada di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa juga didukung dengan terjalinnya koordinasi yang baik Pangkalan

PSDKP Bena dengan instansi terkait dan sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bena sebesar Rp. 349.839.000,- . Sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 349.834.744,- atau 100%.

Tabel 3.14. Perbandingan Capaian dengan Satker UPT/ Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Bena	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	100	100	100	100	100	98	100

Capaian indikator kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan Pangkalan PSDKP Bena apabila dibandingkan dengan satker UPT sejenis adalah sama yaitu 100 kecuali Pangkalan PSDKP Bitung dengan nilai yang lebih rendah yaitu 98.

Sasaran Kegiatan 5. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif", Pangkalan PSDKP Bena telah mengidentifikasi 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu : ¹⁾ Indeks Operasi Kapal Pengawas; ²⁾ Indeks Operasi Speedboat Pengawas; ³⁾ Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP;

Indikator Kinerja 6. Indeks Operasi Kapal Pengawas

Capaian indikator "Indeks Operasi Kapal Pengawas" pada tahun 2025 sebesar 93,95 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 92. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15. Capaian indikator kinerja Indeks Operasi Kapal Pengawas

Indikator Kinerja	2025			2026	2027	2028	2029
	T	R	%	T	T	T	T
Indeks Operasi Kapal Pengawas	92	93,95	102,12	92,25	92,50	92,75	93

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2025 realisasi Indeks operasi kapal pengawas adalah 93,95 dari yang ditargetkan sebesar 92. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 (107,84), capaian pada tahun 2025 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 pemeriksaan objek kelautan pada kapal pengawas Hiu Macan Tutul 02 tidak mencapai target yang ditentukan.

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercepat indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Pencapaian indikator kinerja indeks operasi kapal pengawas Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2025 diperoleh dari kegiatan operasi kapal pengawas di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa sebagai berikut :

Tabel 3.16. Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2025

No	Kapal Pengawas	Jumlah Hari Operasi	Jumlah Jam	Jumlah Kapal Diperiksa	Jumlah Kapal Melanggar	Jumlah Kelautan yang diperiksa
1	Hiu Macan Tutul 02	87	1.062,24	289	17	4
2	Hiu 009	54	207,91	184	4	11

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas yang telah dilaksanakan tersebut maka dengan pengukuran indeks menggunakan formulasi yang telah ditetapkan diperoleh capaian indeks operasi kapal pengawas pada tahun 2025 yaitu 93,95.

Pencapaian kinerja Indeks Operasi Kapal Pengawas telah melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu 92. Pencapaian ini merupakan hasil dari kinerja kapal pengawas Pangkalan PSDKP Benoa, dimana Hiu Macan Tutul 02 didukung oleh 20 awak kapal dan Hiu 009 didukung oleh 11 awak kapal yang mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatannya masing-masing dalam tugasnya dan kondisi kapal pengawas yang dalam keadaan baik (siap operasi). Selain itu keberhasilan pencapaian ini juga didukung dengan adanya kerja sama serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja “Indeks Operasi Kapal Pengawas” sebesar Rp. 17.036.016.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi Rp. 14.419.700.993,- atau 84,64%.

Tabel 3.17. Perbandingan capaian kinerja dengan Satker/UPT sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Indeks Operasi Kapal Pengawas	92	93,95	94,01	97,10	96,8	96,8	96,8

Capaian indikator kinerja “Indeks Operasi Kapal Pengawas” Pangkalan PSDKP Benoa apabila dibandingkan dengan satker UPT sejenis adalah paling rendah dari Pangkalan PSDKP Lainnya.

Indikator Kinerja 7. Indeks Operasi Speedboat Pengawas

Capaian indikator “Indeks Operasi Speedboat Pengawas” pada tahun 2025 sebesar 94,97 dari target yang ditetapkan sebesar 92. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18. Capaian Indikator Operasi Speedboat Pengawas Tahun 2025

Indikator Kinerja	2025			2026	2027	2028	2029
	T	R	%	T	T	T	T
Indeks Operasi Speedboat Pengawas	92	94,97	103,23	92,25	92,50	92,75	93

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2025 realisasi Indeks kinerja operasi Speedboat pengawas adalah 94,97 dari yang ditargetkan sebesar 92. Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 capaian indikator kinerja ini tahun 2025 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya jumlah jam operasi dan kapal yang diperiksa tahun 2024 lebih tinggi.

Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- Cakupan wilayah pengawasan;
- Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon *Illegal*, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Pencapaian indikator kinerja indeks operasi speedboat pengawas Pangkalan PSDKP Bena tahun 2025 diperoleh dari pelaksanaan kegiatan operasi speedboat lingkup Pangkalan PSDKP Bena pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.19. Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas Tahun 2025

No	Speedboat Pengawas	Jumlah Hari Operasi	Jumlah Jam	Jumlah Kapal Diperiksa	Jumlah Objek Kelautan Diperiksa
1	Dolphin 028 (Banyuwangi)	7	29,25	21	2
2	Napoleon 007 (Bena)	26	159,75	37	5
3	Napoleon 023 (Lombok)	2	10	4	-
4	Napoleon 053 (Probolinggo)	5	29,4	17	-
5	Rubberboat (Jembrana)	20	80	118	4

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan operasi speedboat pengawas tersebut maka dengan pengukuran indeks menggunakan formulasi yang telah ditetapkan diperoleh capaian indeks kinerja operasi speedboat pengawas pada tahun 2025 yaitu 94,97.

Pencapaian kinerja Indeks Kinerja Operasi Speedboat telah melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu 92. Pencapaian ini diperoleh dari speedboat lingkup Pangkalan PSDKP Benoa dalam kondisi siap operasi karena selalu dilakukan perawatan baik perawatan rutin maupun darurat serta operator speedboat yang berkompeten. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pangkalan PSDKP Benoa dengan instansi terkait dalam melaksanakan patroli di laut.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja “Indeks Operasi Speedboat Pengawas” sebesar Rp. 319.740.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi Rp. 319.399.270,- atau 99,89%.

Tabel 3.20. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Indeks Operasi Speedboat Pengawas	92	94,97	95,46	97,10	94,69	92,06	95

Capaian indikator kinerja Indeks Operasi Speedboat Pengawas Pangkalan PSDKP Benoa lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP Bitung, tetapi lebih rendah dibandingkan Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Jakarta dan Tual.

Indikator Kinerja 8. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP

Capaian indikator “Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP” pada tahun 2025 sebesar 100% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.21. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemeliharaan Dan Perawatan Prasarana Dan Sarana Pengawasan SDKP Tahun 2025

Indikator Kinerja	2025			2026	2027	2028	2029
	T	R	%	T	T	T	T
Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2025 realisasi persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP adalah 100 dari yang ditargetkan sebesar 100. Capaian ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 memiliki nilai yang sama.

Pencapaian indikator kinerja ini merupakan hasil penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan yang ada di Pangkalan PSDKP Benoa. Sarana pengawasan yang ada di pangkalan PSDKP Benoa tahun 2025 ada 7 (tujuh) unit dan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.22. Sarana Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa

No	Nama Sarana Pengawasan	Lokasi	Pemeliharaan dan Perawatan
1	Kapal Pengawas Hiu Macan Tutul 02	Pangkalan PSDKP Benoa / Satwas SDKP Probolinggo	Perawatan rutin, perawatan prediktif dan perawatan darurat
2	Kapal Pengawas Hiu 009	Satwas SDKP Probolinggo	Perawatan rutin, perawatan prediktif dan perawatan darurat
3	Speedboat 8 Meter Dolphin 028	Satwas SDKP Banyuwangi	Perawatan rutin dan perawatan darurat
4	Speedboat 12 Meter Napoleon 007	Pangkalan PSDKP Benoa	Perawatan rutin dan Perawatan Darurat
5	Speedboat 12 Meter Napoleon 023	Satwas SDKP Lombok Timur	Perawatan rutin, perawatan prediktif dan perawatan darurat
6	Speedboat 12 Meter Napoleon 053	Satwas SDKP Probolinggo	Perawatan rutin dan perawatan darurat
7	Rubberboat	Satwas SDKP Jembrana	Perawatan rutin dan perawatan darurat

Pencapaian indikator kinerja "Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP" tahun 2025 tercapai 100% dikarenakan semua sarana pengawasan yang ada telah dilakukan pemeliharaan dan perawatan sepanjang tahun 2025 baik itu perawatan rutin maupun perawatan darurat, sehingga operasional kapal pengawas dan speedboat maupun rubberboat dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi target. Selain itu juga karena dukungan anggaran Pangkalan PSDKP Benoa dalam perawatan dan pembelian suku cadang yang dibutuhkan serta perawatan mesin armada speedboat telah direncanakan dengan baik dan tepat waktu. Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh awak kapal pengawas dan operator speedboat yang melaksanakan tugasnya dengan baik dengan selalu memeriksa kondisi speedboat secara rutin serta adanya peningkatan kompetensi awak kapal dalam perawatan kapal pengawas.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja "Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP" sebesar Rp. 1.480.235.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 1.480.139.846,- atau 99.99%.

Tabel 3.23. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP	100	100	100	100	100	100	100

Capaian indikator kinerja “Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP” Pangkalan PSDKP Benoa apabila dibandingkan dengan satker UPT sejenis yaitu sama 100%.

Sasaran Kegiatan 6. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan " Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan ", Pangkalan PSDKP Benoa telah mengidentifikasi 2 (dua) indikator kinerja, yaitu : ¹⁾ Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan; dan ²⁾ Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.

Indikator Kinerja 9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Capaian indikator “Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan” pada tahun 2025 sebesar 81 dari target yang ditetapkan 81. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.24. Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Indikator Kinerja	2025			2026	2027	2028	2029
	T	R	%	T	T	T	T
Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81	81	100	82	83	84	85

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2025 realisasi indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa adalah 81 dari yang ditargetkan sebesar 81. Capaian ini apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 (80) mengalami kenaikan karena kriteria indeks pengenaan sanksi.

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang dalam hal ini Pangkalan PSDKP Benoa, untuk :

- a. Pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Surat Peringatan-2 (SP2) dan atau Paksaan Pemerintah (PP);
- b. Pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Pencapaian indikator kinerja Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Benoa pada tahun 2025 diperoleh dari pelanggaran yang

ditangani oleh lingkup wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa. Pengenaan sanksi administratif diperoleh dari persentase penghitungan rata-rata dua 2 sub komponen yaitu :

a. Pengenaan sanksi administratif SPKP

Pengenaan sanksi administratif SPKP didapatkan dari jumlah Lembar Indikasi Pelanggaran (LIP) yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan (sanksi atau laporan bukan pelanggaran) dibagi jumlah LIP yang diterbitkan. Jumlah LIP Pangkalan PSDKP Benoa sebanyak 164 dan LIP yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan sebanyak 152. Sehingga pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran SPKP sebanyak 92,11% dan masuk kriteria indeks 81.

Tabel 3.25. Pengenaan Sanksi Administratif SPKP Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2025

No	Pengenaan Sanksi Administratif SPKP	Jumlah
1	Bukan pelanggaran	81
2	Surat Peringatan I	55
3	Surat Peringatan 2	4
4	Denda Administratif	12
Jumlah		152

b. Pengenaan sanksi administratif non SPKP bidang kelautan dan perikanan.

Pengenaan sanksi administratif non SPKP bidang kelautan dan perikanan didapatkan dari jumlah penetapan sanksi dibagi jumlah pelanggaran. Jumlah pelanggaran bidang kelautan dan perikanan tahun 2025 sebanyak 364. Dan semuanya telah dikenakan sanksi sebagai berikut:

Tabel 3.26. Pengenaan Sanksi Administratif Bidang kelautan dan PerikananPangkalan PSDKP Benoa Tahun 2025

No	Pengenaan Sanksi Administratif	SDK	SDP	Jumlah
1	Surat Peringatan I	221	45	266
2	Surat Peringatan 2	49	2	51
3	SP 3	2		2
4	Paksaan Pemerintah	2	17	19
5	Denda Administratif	10	16	26
Jumlah		284	80	364

Pencapaian ini diperoleh dari hasil dari kinerja pengawas perikanan, polsus PWP3K dan PPNS di lingkup Pangkalan PSDKP Benoa, dimana jumlah pengawas perikanan pada lingkup Pangkalan PSDKP Benoa sebanyak 57 orang, pengawas kelautan 9 orang, polsus PWP3K sebanyak 19 orang dan PPNS berjumlah 17 orang. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung oleh kompetensi yang dimiliki PPNS Pangkalan PSDKP Benoa yang dapat menganalisa dengan baik terkait kasus-kasus yang ada di Pangkalan PSDKP Benoa serta adanya koordinasi yang baik antara Pangkalan PSDKP Benoa dengan instansi terkait.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja “indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan” Pangkalan PSDKP Bena sebesar Rp. 115.321.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi Rp. 115.295.500,- atau 99,98%.

Tabel 3.27. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81	81	81	81	81	81	81

Capaian indikator kinerja indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Bena apabila dibandingkan dengan satker UPT sejenis memiliki capaian indeks yang sama.

Indikator Kinerja 10. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

Capaian indikator “Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan” pada tahun 2025 sebesar 81 dari target yang ditetapkan 81. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.28. Capaian Indikator Kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Indikator Kinerja	2025			2026	2027	2028	2029
	T	R	%	T	T	T	T
Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81	81	100	82	83	84	85

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2025 realisasi indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan ingkup Pangkalan PSDKP Bena adalah 81 atau 100% dari yang ditargetkan sebesar 81. Capaian ini apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 (80) mengalami kenaikan karena kriteria indeks pengenaan sanksi 100%).

Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Perhitungan indeks diperoleh dari jumlah orang/pelaku usaha yang telah selesai diperiksa dibagi jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis pemantauan.

Pada tahun 2025 di Pangkalan PSDKP Bena terdapat 164 dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis SPKP (LIP) dan yang telah ditindak lanjuti semua (100%), dimana 12 dalam proses

pemanggilan, 81 bukan merupakan pelanggaran, SP1 sebanyak 55, SP2 sebanyak 4 dan denda administratif sebanyak 12. Berdasarkan formula perhitungan indeks pemeriksaan analisis SPKP persentase tindak lanjut 100% memenuhi kriteria indeks 81. Sehingga diperoleh capaian indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Benoa adalah 81. Pencapaian ini diperoleh dari hasil dari kinerja pengawas perikanan dan PPNS di lingkup Pangkalan PSDKP Benoa, dimana jumlah pengawas perikanan pada lingkup Pangkalan PSDKP Benoa sebanyak 57 orang dan PPNS berjumlah 17 orang. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung oleh kompetensi yang dimiliki pengawas perikanan Pangkalan PSDKP Benoa yang dapat menganalisa dengan baik terkait penanganan pelanggaran khususnya analisis SPKP yang ada di Pangkalan PSDKP Benoa serta adanya koordinasi yang baik antara Pangkalan PSDKP Benoa dengan instansi terkait.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja “indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan” Pangkalan PSDKP Benoa sebesar Rp. 115.321.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi Rp. 115.295.500,- atau 99,98%.

Tabel 3.27. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81	81	81	81	81	81	81

Capaian indikator kinerja indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Benoa sama dengan Pangkalan PSDKP lainnya yaitu 81.

Sasaran Kegiatan 7. Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja 11. Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

Capaian indikator “Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan” pada tahun 2025 sebesar 81 dari target yang ditetapkan 81. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.28. Capaian Indikator Kinerja Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025

Indikator Kinerja	2025			2026	2027	2028	2029
	T	R	%	T	T	T	T
Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	81	81	100	82	83	84	85

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2025 realisasi Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Benoa adalah 181 dari yang ditargetkan sebesar 81. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 (100), capaian tahun 2025 lebih rendah, namun secara tahapan proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan tahun 2025 juga 100 persen, namun masuk kriteria indeks 81.

Pencapaian indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan tingkat pencapaian penyelesaian penyidikan kasus kelautan dan perikanan. Perhitungan indeks ini diperoleh dari jumlah kasus yang terselesaikan dengan jumlah kasus yang ditangani. Pada tahun 2025 di Pangkalan PSDKP Benoa telah melaksanakan dan menyelesaikan penyidikan sebanyak 2 kasus yaitu penyelundupan BBL dan peredaran BBL tanpa dokumen perizinan. Dimana kedua kasus tersebut telah ditangani dan diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3). Pencapaian ini diperoleh dari hasil dari kinerja pengawas perikanan, pengawas kelautan dan PPNS di lingkup Pangkalan PSDKP Benoa, dimana jumlah pengawas perikanan pada lingkup Pangkalan PSDKP Benoa sebanyak 57 orang, pengawas kelautan 9 orang, dan PPNS berjumlah 19 orang dan didukung dengan anggaran dalam rangka proses penyelesaian penyidikan. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung oleh kompetensi yang dimiliki PPNS Pangkalan PSDKP Benoa yang dapat menganalisa dengan baik terkait kasus-kasus yang ada di Pangkalan PSDKP Benoa serta adanya koordinasi yang baik antara Pangkalan PSDKP Benoa dengan instansi terkait.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja “Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan” Pangkalan PSDKP Benoa sebesar Rp. 83.468.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi Rp. 83.251.272,- atau 99,74%.

Tabel 3.29. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	81	81	81	81	81	81	81

Capaian indikator kinerja Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Benoa sama dengan dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya.

Sasaran Kegiatan 8 : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan “Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”, Pangkalan PSDKP Benoa telah mengidentifikasi 10 indikator kinerja yaitu : ⁽¹⁾ Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Benoa; ⁽²⁾ Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Benoa; ⁽³⁾ Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Benoa; ⁽⁴⁾ Penilaian

Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Benoa; ⁽⁵⁾ Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Benoa; ⁽⁶⁾ Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan; ⁽⁷⁾ Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa; ⁽⁸⁾ Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Benoa; ⁽⁹⁾ Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Benoa; ⁽¹⁰⁾ Nilai Implementasi Program Budaya Kerja.

Capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan “Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan” disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.30. Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Benoa	71,5	89,77	120,00
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Benoa	92	96,04	104,39
Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Benoa	81	85,64	105,73
Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Benoa	86	87,8	102,09
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Benoa	100%	100	100,00
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%	100	105,26
Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa	80	91,44	114,30
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Benoa	75	88,5	118,00
Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Benoa	77	84,9	110,26
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	82,21	117,44

Indikator Kinerja 12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa

Capaian indikator kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa” Tahun 2025 adalah sebesar 89,77 dari target sebesar 71,5. Rincian capaian Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.31. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pangkalan PSDKP Benoa

Indikator Kinerja	2025			2026	2027	2028	2029
	T	R	%	T	T	T	T
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa	71,5	89,77	120,00	81,75	82	82,25	82,5

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran

Pengukuran dan evaluasi kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator

Nilai diperoleh dari data capaian output yang dimasukkan dalam aplikasi SAKTI dan dipantau pada aplikasi SMART Kemenkeu. Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi tersebut Nilai Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2025 sebesar 89,77.

Nilai NKPA Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2025 89,77 lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditargetkan 71,5, dengan nilai capaian 120%. Jika dibandingkan dengan capaian Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2024 (88,79) capaian tahun 2025 lebih tinggi.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 17.568.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 16.937.623,- atau 96,41%.

Tabel 3.32. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa	71,5	89,77	88,76	88,26	92,62	88,78	91,36

Capaian indikator kinerja nilai kinerja perencanaan anggaran (NKPA) lingkup Satker/UPT sejenis lainnya, Pangkalan SDKP Benoa berada di atas Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam dan Bitung namun berada di bawah Pangkalan PSDKP Jakarta dan Tual.

Indikator Kinerja 13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Benoa

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran ini merupakan indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Tabel 3.33. Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pangkalan PSDKP Bena

Indikator Kinerja	2025			2026	2027	2028	2029
	T	R	%	T	T	T	T
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Bena	92	96,04	104,39	92,1	92,15	92,2	92,2

Capaian indikator kinerja “Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran satker lingkup Pangkalan PSDKP Bena” Tahun 2025 adalah sebesar 96,04 dari target sebesar 92. Rincian capaian indikator sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.34. Rincian Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Pangkalan PSDKP Bena

Aspek		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	10	10	92,51
	Deviasi Halaman III DIPA	85,02	15	12,75	
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	95,04	20	19,08	96,88
	Belanja Kontraktual	96	10	9,6	
	Penyelesaian Tagihan	100	10	10	
	Pengeolaan UP dan TUP	96,11	10	9,61	
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	100	25	25	100
Nilai Total		96,04			
Konversi Bobot		100%			
Nilai Akhir		96,04			

Nilai IKPA lingkup Pangkalan PSDKP Bena tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 95,94. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, nilai capaian output 100 sedangkan pada tahun 2024 97,41 sehingga nilai IKPA tahun 2025 lebih tinggi.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 17.568.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 16.937.623,- atau 96,41%.

Tabel 3.35. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker	92	96,04	94,23	94,16	96,5	97,4	93,39

Capaian indikator kinerja nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Pangkalan PSDKP Benoa lebih tinggi dari Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam dan Tual, namun lebih rendah dari Pangkalan PSDKP Jakarta dan Bitung.

Indikator Kinerja 14. Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Benoa

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Capaian indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Benoa” pada tahun 2025 adalah 85,64. Capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan pada 2025 yaitu 81 dengan persentase capaian 105,73%. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.36. Capaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Benoa

Indikator Kinerja	2025			2026	2027	2028	2029
	T	R	%	T	T	T	T
Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Benoa	81	85,64	105,73	81,5	82	82,5	83

Capaian indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024, mengalami penurunan, dimana capaian IP ASN Pangkalan PSDKP benoa tahun 2024 adalah 87,64. Hal ini dikarenakan beberapa ASN yang telah mengikuti diklat atau bimtek masih mengunggah sertifikat pada epegawai.kkp yang seharusnya perhitungan nilai kompetensi IP ASN dihitung berdasarkan sertifikat yang diunggah pada laman <https://asndigital.bkn.go.id>.

Pencapaian indikator kinerja “Indeks profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Benoa” pada tahun 2025 sebesar 85,64 dengan jumlah pegawai yang dihitung 94 orang dan diperoleh dari perhitungan berdasarkan penilaian 4 variabel, sebagai berikut:

Tabel 3.38. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2025

Aspek/Komponen	Bobot	Nilai
Kualifikasi	25	22,45
Kompetensi	40	33,19
Kinerja	30	25

Aspek/Komponen	Bobot	Nilai
Disiplin	5	5
IP ASN PANGKALAN PSDKP BENOA	100	85,64

Pencapaian indikator ini merupakan hasil dari kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh ASN Pangkalan PSDKP Bena telah memenuhi standar, serta mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Keberhasilan pencapaian ini didukung adanya pelatihan secara daring pada kanal digital KKP (E-Milea) dan K/L lainnya (KLC Kemenkeu Learning Center) yang diikuti ASN serta adanya dukungan dari pimpinan dalam rangka internalisasi dan pengembangan ASN.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 7.658.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 7.657.962,- atau 100%.

Tabel 3.39. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Indeks Profesionalitas ASN	81	85,64	82,01	83,33	84,29	82,96	83,32

Capaian indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bena paling tinggi dibandingkan dengan Satker Pangkalan yang lain.

Indikator Kinerja 15. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Bena

Capaian indikator kinerja "Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Bena" pada tahun 2024 adalah 87,8. Capaian ini memenuhi target yang ditetapkan yaitu 86 dengan capaian 102,09%. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.40. Capaian Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Bena

Indikator Kinerja	2025			2026	2027	2028	2029
	T	R	%	T	T	T	T
Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Bena	86	87,8	102,09	88,2	88,4	88,6	88,8

Indikator kinerja "Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Bena" pada tahun 2025 tercapai dengan nilai 87,8 dengan persentase capaian 102,09%. Capaian indikator kinerja ini jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu sebesar 87,75.

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran

kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Penilaian dilakukan pada lembar kerja evaluasi SAKIP pada aplikasi Kinerjaku oleh tim pengelola kinerja Ditjen PSDKP.

Nilai mandiri SAKIP kinerja merupakan nilai akumulasi dari 4 aspek penilaian yaitu perencanaan kinerja (bobot 30%), pengukuran kinerja (bobot 30%), pelaporan kinerja (bobot 15%) dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%). Berikut adalah nilai rekonsiliasi kinerja Pangkalan PSDKP Benoa pada tiap aspek :

Tabel 3.41. Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2025

Nilai	Aspek Penilaian			
	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Bobot	30%	30%	15%	25%
Nilai	27,00	27,00	13,80	20,00
Total Nilai	87,8			

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 17.568.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 16.937.623,- atau 96,41%.

Kegiatan yang mendukung dalam tercapainya indikator kinerja ini antara lain adalah Pangkalan PSDKP Benoa melaksanakan rapat dalam perencanaan dan evaluasi kinerja serta mengikuti kegiatan perencanaan baik perencanaan anggaran maupun kinerja dan mengikuti kegiatan workshop SAKIP lingkup Ditjen PSDKP serta menyusun dokumen kinerja tepat waktu.

Tabel 3.42. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Penilaian Mandiri SAKIP Satker	86	87,8	88,40	90	87,85	90	87,5

Capaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Benoa lebih rendah dari Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Jakarta dan Bitung tetapi lebih tinggi dari Pangkalan PSDKP Tual.

Indikator Kinerja 16. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Benoa

Capaian indikator “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Benoa” pada tahun 2025 sebesar 100% dari target sebesar 100%. Capaian pada tahun 2025 sama jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024.

Tabel 3.43. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)

Indikator Kinerja	2025			2026	2027	2028	2029
	T	R	%	T	T	T	T
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Benoa	100	100	100	100	100	100	100

Penilaian risiko dilakukan melalui form penilaian risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Dari form pemantauan risiko Pangkalan PSDKP Benoa pada tahun 2025 memiliki 16 rencana pengendalian risiko dan 16 realisasi pengendalian risiko, sehingga capaian persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup PSDKP Benoa adalah 100%. Tercapainya indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan pendampingan penyusunan manajemen risiko oleh Setditjen PSDKP serta rapat internal Pangkalan PSDKP Benoa dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian yang bersifat rutin, berkala dan dengan pendekatan manajemen risiko.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 17.568.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 16.937.623,- atau 96,41%.

Tabel 3.44. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko	100	100	100	100	100	100	100

Capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Benoa apabila dibandingkan dengan satker UPT sejenis adalah sama yaitu 100%.

Indikator Kinerja 17. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan

Capaian persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Pangkalan PSDKP Benoa berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2024 (Triwulan IV tahun 2024) s.d 30 September 2025 (Triwulan III tahun 2025) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Hingga 31 Desember 2025 Pangkalan PSDKP Benoa telah

menindaklanjuti 11 rekomendasi hasil pengawasan (LHP) yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal. Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh kerja sama dan komunikasi antar tim kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi LHP serta koordinasi dengan tim Setditjen PSDKP.

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 sama dengan capaian pada tahun 2024 yaitu 100%.

Tabel 3.45. Capaian Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa sampai dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja	2025			2026	2027	2028	2029
	T	R	%	T	T	T	T
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan	95	100	105,26	86	87	88	89

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 17.568.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 16.937.623,- atau 96,41%.

Tabel 3.46. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan	95	100	100	100	100	100	100

Capaian indikator kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan Pangkalan PSDKP Benoa sama dengan satker/UPT sejenis.

Indikator Kinerja 18. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa

Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Benoa adalah data informasi masyarakat yang diperoleh dari survey pelayanan publik di Pangkalan PSDKP Benoa terhadap pelayanan penerbitan SLO dan HPK Kedatangan melalui aplikasi SI SUSAN. Capaian indikator Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2025 adalah 91,44 dari target yang ditetapkan 80. Capaian indikator ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 (90,99). Hal ini dikarenakan

Pangkalan PSDKP Bena selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan serta memberikan kemudahan pada pengguna jasa.

Tabel 3.47. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Bena

Indikator Kinerja	2025			2026	2027	2028	2029
	T	R	%	T	T	T	T
Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Bena	80	91,44	114,30	88,8	89	89,3	89,5

Capaian kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Bena pada tahun 2025 adalah 91,44 dan telah memenuhi target sebesar 90,99 dengan capaian 114,30 %. Nilai tersebut diperoleh karena pelayanan yang diberikan terhadap pengguna layanan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian tersebut adalah sarana yang mendukung dan sosialisasi yang dilaksanakan baik pada saat melayani pelaku usaha maupun melalui media sosial.

Pelayanan publik penerbitan SLO dan HPK Kedatangan lingkup Pangkalan PSDKP Bena dilaksanakan pada beberapa satwas maupun wilker sebagai berikut :

1. Pangkalan PSDKP Bena;
2. Satwas SDKP Lombok Timur;
3. Wilker Teluk Awang;
4. Wilker Tanjung Luar;
5. Wilker Sape;
6. Satwas SDKP Jembrana;
7. Satwas SDKP Banyuwangi;
8. Wilker PP Masami;
9. PU Tanjung Wangi;
10. Satwas SDKP Probolinggo;
11. Satwas SDKP Surabaya;
12. Satwas SDKP Lamongan;
13. Wilker SDKP Bulu;
14. Wilker Gresik;
15. Wilker Tuban;
16. PPI Kranji;

17. Wilker Sumenep;
18. Wilker Situbondo.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 17.568.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 16.937.623,- atau 96,41%.

Tabel 3.48. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Unit Kerja	80	91,44	93,12	92,99	92,14	94,21	99,01

Capaian indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik unit kerja Pangkalan PSDKP Benoa paling rendah dibandingkan dengan Satker/UPT Pangkalan yang lain.

Indikator Kinerja 19. Nilai Pengawasan Kearsipan Pangkalan PSDKP Benoa

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Capaian indikator kinerja “Nilai Pengawasan kearsipan Pangkalan PSDKP Benoa” pada tahun 2025 adalah 88,5. Capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan pada yaitu 75 dengan persentase capaian 118%. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.49. Capaian Indeks Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Ditjen PSDKP Benoa

Indikator Kinerja	2025			2026	2027	2028	2029
	T	R	%	T	T	T	T
Nilai Pengawasan Kearsipan Pangkalan PSDKP Benoa	75	88,5	118,00	81	82	83	84

Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan

Nilai pengawasan kearsipan lingkup Ditjen PSDKP akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan

melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ. Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PSDKP = Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Kearsipan.

Pencapaian indikator kinerja ini diperoleh dari hasil pengawasan tim pengawas kearsipan terhadap pengelolaan arsip Pangkalan PSDKP Bena, dimana dari kegiatan tersebut Pangkalan PSDKP Bena mendapatkan nilai 88,5. Pencapaian tersebut dapat dicapai sesuai target karena didukung oleh pemenuhan sarana dan prasarana dalam pengelolaan arsip dan SDM yang tertib dalam pengelolaan arsip. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 (82,93) capaian tahun 2025 lebih tinggi. Hal ini dikarenakan Pangkalan PSDKP Bena lebih serius menindaklanjuti hasil pengawasan dan lebih tertib dalam pengelolaan arsip serta semakin matang dari sisi SDM dan komitmen pimpinan.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 17.568.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 16.937.623,- atau 96,41%.

Tabel 3.50. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Bena	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Nilai Pengawasan Kearsipan	75	88,5	91,75	88,5	84,9	92,5	86,5

Capaian indikator kinerja Nilai Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP apabila dibandingkan dengan satker UPT sejenis adalah sama dengan Pangkalan PSDKP Batam, lebih tinggi dari Pangkalan SDKP Jakarta dan Tual namun lebih rendah dari Pangkalan SDKP Lampulo dan Bitung.

Indikator Kinerja 20. Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Bena

Capaian indikator kinerja “Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Bena” pada tahun 2025 adalah 84,9. Capaian ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 77 dengan persentase capaian 110,26%. Capaian tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024 karena perbedaan indikator kinerja. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.51. Capaian Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Bena

Indikator Kinerja	2025			2026	2027	2028	2029
	T	R	%	T	T	T	T
Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Bena	77	84,9	110,26	78	79	80	80

Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan adalah hasil penilaian inovasi pelayanan publik yang diterapkan dengan aspek Kebaruan/Nilai tambah, implementasi, signifikansi/dampak, adaptabilitas, strategi keberlanjutan, sumber daya dan diseminasi. Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan dihitung berdasarkan aspek Kebaruan/Nilai tambah(15%) , implementasi (15), signifikansi/dampak (30), adaptabilitas (10), strategi keberlanjutan (10),

sumber daya (5) dan diseminasi (15). Penilaian Inovasi Pelayanan Publik dinilai dan dituangkan dalam berita acara penilaian.

Pencapaian indikator kinerja Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Benoa diperoleh dari inovasi yang diterapkan Pangkalan PSDKP Benoa dalam pelaksanaan kegiatan lomba inovasi lingkup Ditjen PSDKP. Dimana inovasi dari Pangkalan PSDKP mendapatkan nilai 84,90 dan merupakan nilai tertinggi untuk kategori UPT. Keberhasilan pencapaian ini merupakan hasil dari kerjasama dan komunikasi yang terjalin Tim GKT serta dukungan dari pimpinan. Selain itu juga karena adanya kerja sama antara Pangkalan PSDKP Benoa dengan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Benoa adalah STRIKE (Sistem Tracking dan Pemantauan Kapal).

STRIKE (Sistem Tracking dan Pemantauan Kapal) merupakan inovasi Pangkalan PSDKP Benoa yang berfokus pada digitalisasi identitas dan pengawasan kapal perikanan di bawah 30 GT melalui pemanfaatan perangkat Low Cost AIS dan dashboard pemantauan realtime. Inovasi ini mendukung kebijakan Ekonomi Biru, khususnya Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota, dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan, memperkuat keselamatan pelayaran nelayan, serta menekan biaya pengawasan dan potensi pelanggaran. STRIKE menjadi solusi praktis dan berkelanjutan dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan sekaligus meningkatkan kepatuhan dan keamanan operasional kapal perikanan.

Keunggulan Strike :

1. Tepat Sasaran & Berdampak Besar

STRIKE menjawab masalah krusial nasional: pengawasan kapal <30 GT yang jumlahnya sangat besar namun minim sistem pemantauan, sehingga berdampak langsung pada keberhasilan Penangkapan Ikan Terukur dan Ekonomi Biru.

2. Inovasi Hemat Biaya (Low Cost – High Impact)

Menggunakan Low Cost AIS yang terjangkau nelayan kecil, tetapi mampu memberikan data realtime, meningkatkan keselamatan, dan efektivitas pengawasan—nilai tambah besar dibanding sistem mahal konvensional.

3. Teruji Lapangan (Bukan Sekadar Konsep)

STRIKE telah diuji langsung di kapal perikanan, dengan hasil pemantauan stabil, akurat, dan berfungsi sesuai rencana, membuktikan kesiapan implementasi nyata.

4. Meningkatkan Keselamatan Nelayan

Dilengkapi fitur SOS, identifikasi kapal, dan lampu darurat, STRIKE tidak hanya mengawasi, tetapi juga menyelamatkan nyawa—nilai kemanusiaan yang kuat dalam penilaian inovasi.

5. Mendukung Kebijakan Nasional & Regulasi

Selaras dengan PP No. 11 Tahun 2023 dan kebijakan KKP, sehingga STRIKE bukan inovasi berdiri sendiri, tetapi alat strategis pemerintah.

6. Mudah Direplikasi & Diskalakan Nasional

Desain sederhana, biaya rendah, dan sistem dashboard memungkinkan STRIKE diterapkan luas di kapal izin daerah seluruh Indonesia.

7. Kolaboratif & Berbasis Kerjasama Tim

Diinisiasi oleh Pangkalan PSDKP Benoa dan Dikembangkan oleh Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) ini merupakan terobosan antara Direktorat Jenderal PSDKP dengan Politeknik Non Perikanan.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 17.568.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 16.937.623,- atau 96,41%.

Tabel 3.52. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan	77	84,9	83,28	82	80,07	76	84,72

Capaian indikator kinerja Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP paling tinggi di antara nilai Satker/UPT Pangkalan sejenis.

Indikator Kinerja 21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Capaian indikator kinerja "Nilai Implementasi Program Budaya Kerja" pada tahun 2025 adalah 82,21 . Capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 70 dengan persentase capaian 117,44%. Capaian indikator kinerja 18 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.53. Capaian Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Indikator Kinerja	2025			2026	2027	2028	2029
	T	R	%	T	T	T	T
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	82,21	117,44	71	72	73	74

Capaian indikator kinerja "Nilai implementasi program budaya kerja Pangkalan PSDKP Benoa" pada tahun 2025 tercapai dengan nilai 82,82.

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Pangkalan PSDKP Benoa. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan tim budaya kerja Satker menggunakan LKE pelaksanaan program budaya kerja. Dimana dalam LKE tersebut telah ada nilai dari implementasi dari 12 program budaya kerja yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tim Satker nilai 5;
2. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU), nilai 8,33;
3. Lima Menit Sebelum Jadwal nilai 5;
4. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5 R), nilai 6,68
5. Upayakan data terkini (UPDATE), nilai 6;
6. Organisasikan Rapat, Catat, Aksi dan Arsipkan (ORCA), nilai 6;
7. Tegakkan aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT), nilai 20;
8. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA), nilai 10;
9. ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK), nilai 6;
10. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (MANTAP), nilai 9;
11. Hargai, Motivasi dan Inisiatif (HARMONIS), nilai 6,7;
12. Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green), nilai 3,5.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain adalah telah dilaksanakan sosialisasi budaya kerja ASN BerAkhlak melalui zoom meeting yang diadakan oleh Sekretariat Ditjen PSDKP dan diikuti oleh seluruh pegawai, kegiatan ini bertujuan agar seluruh pegawai dapat memahami dan menerapkan budaya kerja ASN BerAkhlak pada kehidupan kerja sehari-hari dan penerapan aspek-aspek budaya kerja yang pada kegiatan pekerjaan sehari-hari seperti ketepatan waktu saat menghadiri pertemuan, menerapkan 5R, dan *go green* dalam melaksanakan pekerjaan.

Dibandingkan dengan nilai budaya kerja tahun 2024 (75,71), capaian tahun 2025 (82,21) mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 inovasi Pangkalan PSDKP Benoa mendapatkan juara 1 dan berkontribusi dalam inovasi kategori sumbang saran.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 17.568.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 16.937.623,- atau 96,41%.

Tabel 3.54. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	82,21	78,89	78,70	81,87	77,67	76,63

Capaian indikator kinerja Nilai implementasi program budaya kerja Pangkalan PSDKP Benoa paling tinggi di antara nilai Satker/UPT Pangkalan sejenis.

C. Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien, telah dilakukan upaya efisiensi atas pemanfaatan sumber daya lingkup Pangkalan PSDKP Benoa.

1. Optimalisasi penggunaan media daring untuk rapat lingkup Pangkalan PSDKP Benoa sebagai upaya untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan SDKP mencakup Satwas lingkup Pangkalan PSDKP Benoa dilakukan pertemuan rapat secara berkala secara daring. Selanjutnya, mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan rekonsiliasi kegiatan juga dilakukan secara daring. Melalui mekanisme ini alokasi anggaran pertemuan di luar kota dan perjalanan dinas dapat dihemat dan dialokasikan untuk output lain yang lebih diprioritaskan.

2. Efisiensi sumber daya manusia Pangkalan PSDKP Benoa

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2025 sumber daya manusia yang mendukung Pangkalan PSDKP Benoa berjumlah 122 orang, pengawas perikanan 57 orang, pengawas kelautan 9 orang, polsus PWP3K 19 orang, PPNS 17 orang, AKP 31 orang. Pengawas perikanan di Pangkalan PSDKP Benoa tidak hanya memiliki kompetensi sebagai pegawai perikanan saja tetapi juga memiliki kompetensi sebagai polsus WP3K, PPNS, pejabat pengadaan barang dan jasa, bendahara, serta petugas operator penatausahaan. Maka dari itu, efisiensi SDM Pangkalan PSDKP Benoa sangat berpengaruh positif dalam pencapaian kinerja tahun 2025.

3. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Pangkalan PSDKP Benoa

Penghitungan efisiensi atas kinerja dapat mengacu pada perhitungan efisiensi pada aplikasi monev.kemenkeu.go.id yang mana Pangkalan PSDKP Benoa memiliki nilai Efisiensi SBK sebesar 50. Nilai Efisiensi disajikan pada grafik berikut:

Gambar 3.2. Nilai Efisiensi Anggaran Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2025



D. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Benoa TA. 2025 sebesar Rp. 41.123.699,000,-. Adanya kebijakan nasional berupa pemblokiran atau penghematan anggaran maka alokasi anggaran Pangkalan PSDDKP Benoa tahun 2025 menjadi Rp. 35.422.608.000,-. Realisasi anggaran hingga 31 Desember 2025 sebesar Rp 32.605.487.721,- dengan persentase 92,05%. Rincian realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2025 berdasarkan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.55. Realisasi Anggaran per Kegiatan

Kode	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	18.835.991.000	16.219.240.109	86,11
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	198.789.000	198.546.772	99,88
2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	707.507.000	707.371.243	99,98
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	15.680.321.000	15.480.329.579	98,72
TOTAL		35.422.608.000	32.605.487.721	92,05

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran kegiatan Pangkalan PSDKP Benoa pada tahun 2025, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan .
2. Capaian kinerja Pangkalan PSDKP tahun 2025 Secara keseluruhan dinyatakan berhasil dengan nilai kinerja organisasi mencapai 105,71 % dengan realisasi anggaran sebesar 92,05%
3. Hasil capaian indikator kinerja pada tahun yang diperjanjikan sudah seluruhnya tercapai sesuai target yang ditetapkan. Namun demikian Pangkalan PSDKP Benoa akan terus meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil evaluasi atas kinerja Pangkalan PSDKP Benoa untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rekomendasi Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2025

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Peningkatan Performa Kapal Pengawas Hiu Macan Tutul 02	Melakukan docking kapal pengawas Hiu Macan Tutul 02
2	Peningkatan Nilai IP ASN	Instruksi pimpinan untuk mengunggah sertifikat kompetensi pada laman https://asndigital.bkn.go.id .
3	Peningkatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Melakukan publikasi mengenai kemudahan penggunaan fitur aplikasi kepada para pengguna jasa
4	Belum adanya arsiparis	Mengusulkan pengajuan jabatan arsiparis

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

2. PENGHARGAAN YANG DIRAIH TAHUN 2025

- **UNIT ORGANISASI BERPREDIKAT INFORMATIF**
- **INOVATOR TERBAIK 1 KATEGORI UNIT PELAKSANA TEKNIS**
- **PERINGKAT II SATUAN KERJA TERBAIK PENGGUNA KARTU KREDIT PEMERINTAH TRANSAKSI TERTINGGI SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2025**

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id SUREL direnpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BENOA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edi Purnomo

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Benoa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa



Edi Purnomo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BENOA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	82
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2 Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100
		3 Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4 Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	82
4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5 Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82
5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6 Indeks operasi kapal pengawas	92
		7 Indeks operasi speedboat pengawas	92
		8 Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	100
6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9 Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81
		10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81
7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	81
8	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Benoa	71,5
		13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Benoa	92
		14 Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Benoa	81
		15 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Benoa	86

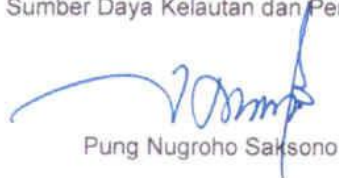
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
		16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Bena	100%
		17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Bena yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%
		18 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Bena	80
		19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Bena	75
		20 Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Bena	77
		21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
a.	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	18.835.991.000
b.	Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	198.789.000
c.	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	707.507.000
2.	Program Dukungan Manajemen	15.680.321.000
	Total Anggaran Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2025	35.422.608.000

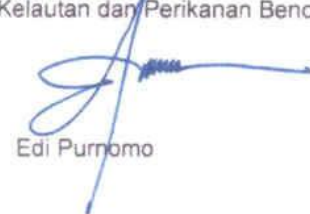
Jakarta, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa



Edi Purnomo

2. PENGHARGAAN YANG DIRAIH TAHUN 2025

- UNIT ORGANISASI BERPREDIKAT INFORMATIF



- **INOVATOR TERBAIK 1 KATEGORI UNIT PELAKSANA TEKNIS**



- **PERINGKAT II SATUAN KERJA TERBAIK PENGGUNA KARTU KREDIT PEMERINTAH TRANSAKSI TERTINGGI SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2025**

